

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepariwisata akhir-akhir ini sering menjadi pokok pembicaraan yang hangat di berbagai media massa, diskusi atau seminar terutama perkembangan pariwisata di daerah yang memiliki asset wisata yang beraneka ragam, terutama wisata alam budaya yang indah, bukit-bukit dengan panorama yang permai, adat istiadat beraneka ragam, serta flora dan fauna yang khas dan langka. “Inilah yang menyebabkan pola perjalanan wisata dirancang sampai ke daerah atau kecamatan yang terkecil”.<sup>1</sup>

Peningkatan kepariwisataan ini dibutuhkan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembicaraan dari pemerintah supaya masyarakat mengupayakan dalam meningkatkan devisa negara, karena manusia adalah sebagai pemeran utama dalam mengembangkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin.

Menurut B.J.Habibie bahwa dalam melaksanakan teknologi, perlu adanya pengendalian dan pemanfaatan teknologi yang dikendalikan oleh sumber daya manusia yang merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan berhasil tidaknya ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara efisien dan produktif untuk meningkatkan taraf hidup manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsidar, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata*, Yogyakarta, 1999, hal.53.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.23

Kesadaran manusia akan pentingnya mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu pemasukan devisa bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini didukung oleh pendapat Oka A.Yoeti, yang menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pemasukan devisa bagi pemerintah yang cukup besar. Sebelum tahun 1980-an pemerintah Indonesia telah melihat potensi 13.677 pulau yang ada dan ratusan variasi adat kebudayaan yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri.

Kemudian Pemerintah melahirkan beberapa keputusan penting di bidang pariwisata. Seperti terbentuknya Yayasan Tourist Indonesia (1955), Dewan Tourism Indonesia (1957), dan lembaga-lembaga pariwisata nasional (1980) yang pada dasarnya semua lembaga tersebut bertugas mengenai masalah kepariwisataan nasional. Kebijakan pemerintah di bidang ini semakin memiliki arah yang jelas. Apalagi kemudian dikeluarkannya Keppres No.30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional sebagai salah satu sumber devisa negara.<sup>3</sup>

Penjabaran lebih lanjut dari Keppres No.30 tersebut adalah keluarnya Instruksi Presiden No.9 Tahun 1969, dimana dalam Pasal 2 dicantumkan, bahwa pengembangan kepariwisataan digerakkan dengan tujuan meningkatkan devisa pada khususnya dan memberi kesempatan kerja sektor pariwisata serta memperkenalkan budaya-budaya yang ada dan mendayagunakan keindahan alam Indonesia, disamping meningkatkan persaudaraan dan persahabatan internasional. Dari momentum inilah konsep pariwisata mulai diperkenalkan di Indonesia. Untuk mendukung kebijakan terpenuhinya target ini, berbagai kebijakan yang diharapkan akan mampu meningkatkan angka wisatawan ke Indonesia.

---

<sup>3</sup> Oka A.Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Aksara, Bandung, 1983, hal. 3.